



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MURSYIDAH
2. Jabatan : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
3. NHK : 174356

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.148.098.160

1. Tanah Seluas 391 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI  
Rp. 441.100.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 228 m2/70 m2 di KAB / KOTA  
MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.343.998.160
3. Tanah dan Bangunan Seluas 189 m2/139 m2 di KAB / KOTA  
MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 363.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 105.800.000

1. MOBIL, NISSAN/JUKE MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.  
97.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI  
Rp. 3.900.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTIR Tahun 2012, HASIL SENDIRI  
Rp. 4.900.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 10.500.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 130.705.397

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 2.395.103.557

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.395.103.557

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.